

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan maupun Instansi Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang yang bergerak di bidang usaha apapun, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari perencanaan. Perencanaan yang baik sangat penting bagi perusahaan terutama instansi pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang yang seluruh kegiatannya akan di pertanggungjawabkan kepada publik. Perencanaan merupakan suatu tindakan yang di buat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan di lakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang di inginkan merupakan garis-garis besar untuk dapat melakukan usaha, di mana kebijaksanaan di tetapkan, rencana kerja di susun, baik mengenai saat di laksanakan dan bagaimana usaha itu akan di kerjakan.

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan di nyatakan dalam suatu unit militer. Sedangkan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) merupakan instrumen bagi kebijakan Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang yang mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas efektivitas Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satu moniter yang menggunakan dana milik masyarakat.

Menurut (Mardiasmo,2017) analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang perlimpahan tanggung jawab akan di ikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan, dan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.Oleh karena

itu pengelolaan keuangan yang di lakukan dengan efisien dan efektif harus di lakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah, dan ternyata realisasi seringkali tidak sesuai dengan target. Kalau pengelolaan keuangannya sudah efisien dan efektif berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu untuk di dorong atau di genjot lagi agar supaya pengelolaannya akan lebih membaik dan ini akan menjamin kemandirian keuangan daerahpun semakin lama semakin membaik.

Pendapatan asli daerah merupakan indikator kemandirian suatu daerah artinya semakin meningkatnya proporsi penerimaan PAD terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan daerah yang di tunjukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah tersebut menunjukkan kemandirian dalam hal pembiayaan pembangunan daerahnya. Pelaksanaan sistem desentralisasi pemerintahan di indonesia yaitu pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah berarti pemberian kewenangan dan keleluasan kepada daerah untuk mengelolah dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasan yang luas tersebut harus di ikuti dengan pengawasan secara intensi.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan

APBD, penetapan APBD penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, pentausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, azas kepatutan, dan azas manfaat bagi masyarakat di suatu daerah.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara output dan tujuan (Maharani, 2018). Semakin besar kontribusi-kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program, kegiatan atau organisasi tersebut. Keefektifan keuangan daerah dapat dilihat sejauh mana suatu keadaan mempergunakan atau memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara ekonomis, hemat (efisien) dan dilakukan secara tepat sasaran (efektif), serta hasil yang dicapai tersebut memiliki rasionalitas terhadap sumber-sumber yang ada (produktivitas).

Menurut Halim (2017:234-241). Pengukuran Efektivitas dan Efisiensi keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung rasio efisiensi dan efektivitas keuangan daerah. Menurutnya, rasio efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, Sedangkan rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan (pendapatan) daerah.

Efisiensi Pemerintah daerah (Pemda) memerlukan perhatian khusus di Indonesia. Pemerintah daerah seharusnya mampu mewujudkan belanja yang efisien karena

desentralisasi fiskal di desain dengan asumsi bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah di harapkan mampu merealisasikan pendapatan yang mereka punya dengan membelanjakan dana yang di berikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Namun alokasi anggaran pada APBD masih banyak yang tidak efisien karena pemerintah daerah yang menghabiskan anggaran dana hanya untuk membayar gaji pegawai atau belanja pegawai (Syahdulah, 2019)

Berdasarkan penelitian diatas adalah tempat penelitian Kota Kupang melalui badan keuangan dan aset daerah (BKAD). Kota Kupang merupakan salah satu Kota yang berada di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan Kota Kupang menjadi tempat penelitian berdasarkan salah satu kota yang terus meningkatkan operator daerahnya dan cenderung mengalami peningkatan APBD setiap tahunnya. Sektor industri pariwisata, pertanian dan pembangunan infrastruktur kehutanan dan lainnya serta kontribusi pajak daerah di Kota Kupang. Daerah ini selalu mengharapkan agar PAD terus mengalami peningkatan serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat agar mampu meningkatkan otonomi dan keleluasan daerah. Sehingga penelitian ingin mengetahui seberapa tingkat APBD yang telah dilaksanakan di Kota Kupang. Alasan lain penelitian memiliki keuangan daerah Kota Kupang karena tersedianya bahan literatur yang memadai sehingga dapat mempermudah penelitian dalam menyusun penelitian ini.

Sehubungan dengan hal itu, pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Kupang, perlu di dukung dengan suatu studi yang mendalam guna melakukan evaluasi kinerja pemerintahan terhadap seluruh rangkaian pembangunan daerah di Kota Kupang.

Penelitian Terdahulu: Novlie Manopo (2012) dengan judul tentang Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten minahasa utara. Tujuan dalam penelitian ini untuk Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

Penelitian Terdahulu: Debby Ch Rotinsulu Sri Murni (2007) dengan judul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada pemerintah DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

Penelitian Terdahulu: Jamaliah, Rosyadi (2010) dengan judul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi PAD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2016	144.455.277.759,00	165.449.023.460,93	114,53
2017	207.804.696.398,00	229.137.473.528,55	110,27
2018	177.648.571.543,00	171.940.709.096,75	96,78
2019	195.336.408.043,00	185.051.575.342,52	94,73
2020	163.030.592.170,00	167.530.108.045,48	102,76
Total	888.275.545.913,00	919.108.889.471,00	103,82

Sumber :BPS,BKAD Kota Kupang dalam Angka 2016-2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang pada lima tahun berturut-turut 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 realisasinya mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2016 realisasi angka tidak rendah di bandingkan anggaran yang di berikan oleh pemerintah yaitu sebesar 114,53%, di tahun 2016 realisasi anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 110,27%, di tahun 2018 realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 96,78%, 2019 realisasi anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 94,73%, da di tahun 2020 realisasi anggaran mengalami penurunan yaitu sebesar 102,76%.

Sehubungan dengan hal itu, pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Kupang, perlu di dukung dengan suatu studi yang mendalam guna melakukan evaluasi kinerja pemerintahan terhadap seluruh rangkaian pembangunan daerah di Kota Kupang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah”.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisien Pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset daerah Kota Kupang sudah di lakukan secara efektif?.
2. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sudah di lakukan secara efisien?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang pada tahun 2016-2020.
- b. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang pada tahun 2016-2020.

1.4.2 Manfaat

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Akademis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) pada umumnya dan Fakultas Ekonomi khususnya.

- b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan dan referensi dalam usaha peningkatan pengelolaan keuangan daerah khususnya di wilayah penelitian yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.